

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menekankan pada proses kerja sama G-20 terhadap penanganan krisis finansial global periode 2008-2009. Pascaberakhirnya rezim Bretton Woods pada tahun 1971 belum memberikan kepastian bahwa terhadap rezim moneter internasional yang ada akan lebih baik dari sebelumnya. Hal itu dapat terlihat dari lima titik sejarah dan siklus krisis ekonomi yang telah penulis paparkan sebelumnya, antara lain embargo minyak bumi OPEC pada 1973, krisis finansial di Amerika Latin pada tahun 1980-an, *bubble economy* Jepang pada awal 1990-an, krisis finansial Asia 1997, dan yang terakhir, krisis finansial global 2008. Salah satu ciri yang membuat perbedaan cukup besar antara krisis terakhir dengan krisis yang lain-lainnya adalah bahwa krisis sekarang ditangani negara-negara maju plus negara berkembang dengan menggunakan rezim sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Ketika G-20 terbentuk pada 1999 setelah siklus krisis keempat terjadi, belum terlalu tampak harapan baru di masyarakat internasional atas perbaikan kondisi perekonomian dunia pada umumnya, dan reformasi sistem moneter internasional pada khususnya. Keefektifan dan kapabilitas kerja sama G-20 baru mulai teruji setelah krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat pada pertengahan 2007 terjadi. Banyak dinamika yang terjadi dalam penanganan krisis selama periode 2008-2009 ini. Respons G-20 terhadap ancaman krisis finansial kemudian menghasilkan tiga komunike yang kemudian menjadi landasan dan semangat bersama dalam mencapai interest bersama, yakni pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global yang berkesinambungan (*sustainable*).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dan *Historical Perspective Research* dengan tanpa meninggalkan tahapan kritik sebagai bagian penting dalam penelitian. Eksplanasi yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah respons kerja sama G-20 terhadap penanganan krisis finansial global 2008-2009. Teori neorealisme yang diwakili oleh pemikiran Stephen Krassner penulis anggap tepat dalam mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana kerja sama G-20 telah merespons ancaman krisis finansial global 2008. Penerapan teori neorealisme dalam hubungan antarvariabel telah memunculkan

pencapaian-pencapaian tujuan awal yang dimungkinkan terjadi melalui media rezim dan kerja sama keuangan internasional (*regime as intervening variable*), dan penulis berhasil satukan melalui metode eksplanasi proses dan pola penanganan krisis finansial global 2008-2009. Dalam eksplanasi tersebut, tidak dapat dipisahkan pula pemahaman mengenai siklus krisis ekonomi di berbagai wilayah di dunia. Selain itu, pemahaman atas interkoneksi jejaring kapital lokal - internasional dan kebijakan otoritas dalam pasar finansial juga menjadi hal yang penting untuk dianalisis. Semua ini mengingat pada dasarnya keadaan ekonomi pada era globalisasi tidak terlepas dari interkoneksi jejaring kapital lokal - internasional dan kebijakan otoritas sebagai *platform* kegiatan ekonomi. Penggunaan metode *Historical Perspective Research* juga berkontribusi secara signifikan dalam penelitian ini – diterapkannya pemahaman sejarah atas sistem moneter internasional, dari masa *gold standard* hingga pascaBretton Woods, dapat membantu penulis dalam menganalisis pola dan alur kerja sama penanganan krisis finansial global oleh G-20 karena pada dasarnya latar belakang sejarah dapat menentukan perubahan pola dan alur kerja sama internasional. *Historical Perspective Research* diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendetil tentang keadaan sistem moneter internasional, dan bagaimana mengidentifikasi perubahan yang tampak dari kerja sama G-20.

Dalam penelitian ini, penulis berhasil menghasilkan temuan-temuan penting di mana terdapatnya keinginan dan implementasi negara-negara G-20 untuk meregulasi sektor keuangan dan mereformasi sistem keuangan global, termasuk di dalamnya reformasi institusi internasional yang menjadi kendaraan negara-negara dunia untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pemahaman bahwa penanganan isu-isu global selalu didominasi oleh negara-negara maju menjadi sedikit bergeser dengan adanya peran aktif negara-negara berkembang dalam kerja sama yang berlangsung itu – mulai dari rencana reformasi kuota, *voting power* di IMF hingga transparansi dan kredibilitas proses pemilihan staf pejabat lembaga keuangan internasional itu. Pergeseran fundamental juga tampak dari konsep *orthodoxy laissez-faire* yang kemudian beralih secara pelan-pelan ke regulasi dan kontrol negara terhadap sektor perekonomian. Lima kali krisis besar yang terjadi semenjak kolapsnya rezim Bretton Woods telah sedikit banyak memberi pelajaran bagi para pembuat kebijakan (*decision-makers*) G-20, terutama jika kita berkaca dari sudut pandang optimisme hasil komunike G-20 di mana lima agenda utama sedang berjalan – beberapa di antaranya mulai terlihat hasilnya, seperti ekspansi kebijakan ekonomi negara-negara G-20 yang dikaitkan dengan keadaan inflasi dan GDP global, regulasi standar pemberian kredit yang lebih ketat,

framework jangka panjang yang lebih komprehensif (*sustainable growth*), hingga pemberantasan praktik-praktik *shadow banking system* dan *tax havens*.

Penelitian dan penulisan mengenai eksplanasi, serta tema ini dapat dikatakan telah berhasil karena penelitian ini telah menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan penulis. Kerja sama G-20 periode 2008-2009 telah merespons ancaman-ancaman krisis finansial global dengan kendaraan rezim internasional, atas dasar beberapa agenda utama. Proses dan respons tersebut dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini, mulai dari sejarah singkat mengenai keadaan IMS sejak globalisasi pertama terjadi hingga periode krisis finansial global yang terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi-politik internasional, dan munculnya tiga komunike G-20 pada tahun 2008 dan 2009 yang menjadi landasan kerja sama penanganan krisis finansial global. Penelitian ini telah membuktikan hipotesis yang diajukan pada awal penelitian, yaitu:

Proses kerja sama G-20 dalam penanganan krisis finansial global 2008-2009 dilakukan oleh negara dengan menggunakan rezim-rezim keuangan internasional sebagai fasilitator untuk mencapai pemulihan ekonomi global dan reformasi keuangan global.

4.2. Implikasi Kebijakan dan Kerja sama G-20

Implikasi kebijakan otoritas dan penerapan standar-standar baru dalam kerja sama G-20 ini merupakan hal yang positif bagi negara-negara dunia dalam mencapai pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Bagi negara-negara berkembang, pergeseran *power* yang sedikit banyak tercermin melalui reformasi sistem moneter dan institusi keuangan internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju, merupakan sinyal yang bagus bagi dinamika kepemimpinan global dan terutama, ruang pertumbuhan perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, keputusan yang diambil oleh aktor-aktor dunia internasional sudah barang tentu menghasilkan dinamika ekonomi-politik internasional. Bagi Indonesia sebagai bagian dari aktor yang memberi warna dalam dinamika ekonomi-politik internasional, sebagai salah satu anggota dari G-20 itu sendiri, sebagai negara yang pernah mengalami pahitnya krisis finansial pada tahun 1997 dulu, dan sebagai calon ketua tahun berjalan G-20 pada tahun 2013, diharapkan dapat menjadi motor di kawasan Asia Tenggara khususnya dalam mendorong pencapaian pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sesuai dengan agenda utama

G-20. Kebijakan ekonomi Indonesia, baik secara fiskal maupun moneter terlihat cukup konsisten dan tangguh ketika krisis finansial global terjadi dapat menciptakan hal yang positif bagi pemulihan ekonomi global. Dalam hal ini, Indonesia yang tidak memiliki sistem keuangan yang selonggar AS, contohnya bisa belajar dari pengalaman itu, dan lebih memberdayakan perekonomian nasionalnya dengan orientasi produk riil dan ketahanan cadangan devisa, selain ekspor bahan-bahan mentah seperti yang berjalan selama ini. RI juga perlu belajar dari pengalaman negara-negara maju atas ancaman liberalisasi finansial, khususnya dalam era ketidakstabilan moneter internasional seperti sekarang ini.

Dalam tiga tahun mendatang, RI akan menjabat kursi ketua tahun berjalan, dan ini berarti bahwa fokus pembahasan G-20 pada tahun 2013 itu sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Indonesia dapat menggunakan hak prerogratifnya untuk memilih tema-tema ekonomi global yang relevan dengan kepentingan nasional pada khususnya, dan kepentingan negara-negara berkembang pada umumnya. *Leverage* Indonesia di kursi kepemimpinan global nantinya akan diuji, kita masih memiliki tiga tahun masa persiapan yang tersisa. Sayangnya, seperti tipikal beberapa kawasan berkembang yang memiliki keterbatasan modal, Indonesia tidak berpartisipasi dalam NAB IMF yang disepakati baru-baru ini, padahal peluang ini sangat potensial memberikan prestise dan pada akhirnya *leverage* di mata komunitas internasional tersebut. Pandangan ini realistis jika kita memakai logika kuota dasar IMF dan iuran wajibnya yang berjalan selama ini.

Bagi kerja sama G-20 itu sendiri, implikasi kebijakan dan standar-standar baru yang dihasilkan selama proses kerja sama diharapkan dapat terus menjadi hal yang positif. Keinginan negara-negara berkembang dan sebagian besar negara-negara Eropa untuk mereformasi sistem keuangan internasional secara total (Bretton Woods II) diharapkan dapat disepakati oleh terutama AS. Sistem yang benar-benar baru itu pernah digagas oleh John Keynes sebelum rezim Bretton Woods berdiri, hingga seperti yang dicetuskan oleh Presiden Perancis, Nicholas Sarkozy, belum lama ini. Era ketidakjelasan sistem moneter pascaBretton Woods telah terbukti tidak stabil, seperti yang telah kita lihat dari lima kali masa krisis. Bagaimanapun juga, tujuan semangat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable growth*) G-20 merupakan inovasi baru dari sistem yang ada, dan dituntun dengan standar-standar internasional baru, serta dengan alokasi program kapital internasional yang tidak sedikit. Ini semua patut diperjuangkan oleh masing-masing negara yang ingin mempertahankan *interest*-nya, dan sekali lagi berpulang pada komitmen dan *political will*

tiap negara dalam mematuhi semua konsensus yang terjadi di forum G-20 itu. Hanya waktu yang akan membuktikannya.

4.3. Implikasi Teoritis

Tesis ini membuktikan bahwa respons dan penanganan krisis finansial global dapat dicapai melalui kerja sama internasional *ad hoc*, dan melalui kontribusi kolektif para konstituennya. Proses pencapaian tersebut antara lain dilakukan G-20 dengan kendaraan rezim internasional, seperti IMF, World Bank, FSB, *12 key international standard and codes* dengan dipandu lima prinsip utama (*five main principles*). Selain itu, pemaparan mengenai proses respons dan penanganan krisis finansial juga menggambarkan bagaimana *self-interest*, *political power*, *usage and custom*, dan *knowledge* muncul dalam pola kerja sama G-20. Peran negara terhadap sektor perekonomian (sektor finansial) dalam kerja sama G-20 mencerminkan tentang signifikansi dan dominasi negara. Hal itu berimplikasi secara teoritis bahwa *state* bertanggungjawab secara penuh atas kesejahteraan nasionalnya sehingga pilihan liberalisasi sektor finansial harus dibarengi dengan kesiapan pasar dan regulasi yang efektif serta komprehensif. Selain itu, implikasi lainnya adalah persyaratan dan pengawasan (*supervision*) transparansi, integritas, dan kredibilitas lembaga/firma keuangan di pasar bebas oleh negara dan rezim internasional yang berwenang.

Dalam tingkat global, fenomena kerja sama *ad hoc* G-20 juga membuktikan bahwa sistem moneter internasional yang baru belum tercipta sepenuhnya, dan negara-negara dunia masih memilih untuk bertahan dengan *status quo* pascaBretton Woods, hanya bedanya diperkuat/dioptimalisasi (*reinforce*) dengan peran aktif negara itu sendiri melalui intervensi likuiditas dan reformasi sektor keuangan.

4.4. Saran

Untuk penelitian lanjut mengenai permasalahan penanganan krisis finansial oleh kerja sama G-20, dapat dilakukan dengan menggambarkan keadaan dan dinamika ekonomi-politik internasional terkini di mana program kerja sama G-20 terlihat belum meredakan ketidakstabilan pasar di kawasan Eropa, terutama dengan adanya kasus *default* otoritas Yunani yang kemudian menggunakan fasilitas pinjaman IMF. Selain itu, penelitian lanjutan

juga dapat dilakukan tentang keefektifan masing-masing rezim internasional secara spesifik yang terlibat dalam penanganan krisis finansial global, antara lain IMF, FSB, World Bank, dan lain-lain sebagai penelitian yang lebih mendalam atas tema yang masih sangat baru dan luas ini.

Penulis juga merekomendasikan, khususnya kepada otoritas Republik Indonesia agar memainkan peran aktif dalam pengawasan dan kebijakan liberalisasi finansial, terutama di wilayah yurisdiksinya. Hal ini relevan terutama karena RI sendiri pernah mengalami sendiri pahitnya krisis finansial. Belajar dari pengalaman dan data-data empiris yang ada, liberalisasi finansial (*wealth accumulating*) di tengah era globalisasi seperti sekarang menyimpan potensial yang besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus efek negatif yang pengaruhnya sangat besar, termasuk terhadap kehidupan benegara sekalipun. Pengawasan dan kontrol negara terhadap sektor ekonomi dan sektor finansial menjadi sangat dibutuhkan, *good governance* juga harus terus diterapkan dan ditegakkan, selain dari kerja sama internasional *ad hoc* yang dilangsungkan itu sendiri.

